

ABSTRAK

Penelitian ini membahas relasi kuasa antara pemilik usaha penyulingan minyak ilegal dengan masyarakat di Dusun Teluk Nibung, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Penelitian berangkat dari fenomena berlanjutnya usaha ilegal yang berisiko menimbulkan bahaya (seperti kebakaran, ledakan, dan pencemaran) tanpa adanya penolakan terbuka dari masyarakat sekitar. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami alasan masyarakat tidak melakukan penolakan serta menjelaskan bagaimana relasi kuasa terbentuk dan dijalankan. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam dengan pemilik usaha, warga terdampak, dan kepala dusun sebagai informan penghubung, serta studi dokumen. Analisis data dilakukan dengan model interaktif Miles dan Huberman melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap diam masyarakat dipengaruhi oleh dua hal utama: (1) rasa takut terhadap kekuatan ekonomi dan dukungan aparat yang dimiliki pemilik usaha, serta (2) upaya menghindari konflik karena ketergantungan ekonomi, mengingat penyulingan minyak ilegal menjadi sumber penghidupan penting bagi warga. Relasi kuasa terbangun melalui kontrol ekonomi (ketergantungan mata pencaharian) dan kuasa simbolik (pemberian bantuan dan perhatian untuk membangun citra positif). Kesimpulannya, diamnya masyarakat bukan berarti setuju, melainkan strategi bertahan hidup dalam situasi kuasa yang timpang. Relasi kuasa bekerja secara koersif (melalui rasa takut), utilitarian (melalui keuntungan ekonomi), dan normatif (melalui legitimasi simbolik), yang menempatkan masyarakat pada posisi penerimaan yang terpaksa.

Kata Kunci: Relasi Kuasa, Penyulingan Minyak Ilegal, Strategi Bertahan, Kontrol Ekonomi, Kuasa Simbolik.

ABSTRACT

This study examines the power relations between the owner of an illegal oil refinery and the local community in Dusun Teluk Nibung, Langkat Regency, North Sumatra. The background of this research lies in the persistence of illegal activities that pose risks such as fire, explosion, and pollution, yet face no open resistance from the affected community. The aim is to understand why the community refrains from open opposition and to explain how power relations are formed and maintained. Using a qualitative case study approach, data were collected through observation, in-depth interviews with the business owner, affected residents, and the village head as a key informant, as well as document analysis. Data analysis employed the interactive model of Miles and Huberman, which includes data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings reveal that community silence is shaped by two main factors: (1) fear of the owner's socio-economic power and protection from authorities, and (2) conflict avoidance due to economic dependence, as the refinery serves as a crucial source of livelihood. Power relations are maintained through economic control (creating dependency) and symbolic power (providing aid and attention to foster a positive image). In conclusion, the community's silence does not signify agreement but rather a survival strategy within an unequal power structure. Power operates coercively (through fear), utilitarianly (through economic benefits), and normatively (through symbolic legitimacy), placing the community in a position of forced acceptance.

Keywords: *Power Relations, Illegal Oil Refinery, Survival Strategy, Economic Control, Symbolic Power.*